

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DI PERPUSTAKAAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ilmu Perpustakaan (S.IP) Jurusan Ilmu Perpustakaan
pada Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUHDAR AL KAHFI

NIM: 40400112145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
FAKULTAS ADAB & HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, ***“Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar”***, yang disusun oleh saudara **MUHDAR ALKAHFI**, NIM: 40400112145, Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, telah disetujui dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at 25 Agustus 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Perpustakaan (S.I.P) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, dengan beberapa perbaikan.

Samata – Gowa, 28 November 2017 M
09 Rabiul 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dra. Laely Yuliani Said, M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Muh. Quraissy Mathar, S.Sos., M.Hum.	(.....)
Munaqisy II	: Syamsuddin, S.Hum., M.Si.	(.....)
Konsultan I	: Dr. Andi Miswar, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Konsultan II	: Himayah, S.Ag., S.S., MIMS	(.....)

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Barsihannor, M. Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada orang tua tercinta, ibunda Hawatia Hatma dan Abdul Muthalib kepada wali Siti Marwani dan Muhammad Kaddas serta segenap keluarga besar yang telah mengasuh, membimbing dan membiayai penulis selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini, kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah swt mengasihi, melimpahkan rezki-Nya dan mengampuni dosanya. Amin.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si., Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Pembantu Rektor beserta jajarannya.
2. Dr. H. Barsihhannor, M. Ag., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.

3. Dr. A. Ibrahim S.Ag., S.S., M.Pd., dan Himayah S.Ag., S.S., MIMS., masing-masing selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Perpustakaan.
4. Muh. Quraisy Mathar, S.Sos., M.Hum., dan Syamsuddin, S.Hum., M.Hum., masing-masing selaku dewan Penguji yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan saran bermanfaat guna untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Andi Miswar, S.Ag., M.Ag., dan Himayah, S.Ag., S.S., MIMS., masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
6. Para dosen dan pegawai dalam lingkup Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kepada saudariku Muchlisa Riska Utami terima kasih yang tak terkira telah berkontribusi banyak meluangkan waktu dan membantu hingga terwujudnya penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku di Jurusan Ilmu Perpustakaan 2012 terkhusus Mansyur, Aswar Arahad, Andi Pandita, Akbar, Asril Sapli, Edy, Aswandi, Amirullah, Zainuddin, Iqbal, Nur Arifin, Ihsan dan Rahmat Firnanda serta adik-adik junior yang selalu mensupport (sukses untuk kita semua, Aamin).

9. Rekan-rekan KKN Angkatan 51 desa Kalebarembeng kecamatan Bonto Nempo, Kabupaten Gowa serta Bapak Kepala Desa dan Ibu selaku orangtua kami disana.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu penyusun mendapat pahala di sisi Allah swt, serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penyusun sendiri.

Makassar, Agustus 2017

Penulis,

Muhdar Al Kahfi

NIM: 40400112145

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian/Deskripsi Fokus.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	10
A. Implementasi.....	10
B. Hak Cipta.....	12
C. Esensi Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	16
D. Norma Pembatasan Hak Cipta	19
E. Pelanggaran Hak Cipta.....	21
F. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30

E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data.....	32
G. Uji Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57

ABSTRAK

Nama : Muhdar Al Kahfi
Nim : 40400112145
Jurusan : Ilmu Perpustakaan
Fakultas : Adab dan Humaniora
Judul : Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang diperoleh peneliti dari hasil observasi awal dan pengalaman sebagai pemustaka di perpustakaan UIN Alauddin Makassar, tampaknya perpustakaan ini sudah menerapkan undang-undang Hak Cipta seperti adanya kebijakan membatasi jumlah koleksi yang akan difotokopi pemustaka namun kebijakan yang dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya belum terealisasi dengan baik. Sehingga dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah berikut: 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam melindungi hak cipta? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam melindungi hak cipta?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi undang-undang hak cipta di perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedang instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai subjek untuk melakukan wawancara dengan alat bantu berupa pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta pada Perpustakaan UIN Alauddin Makassar telah diterapkan, dalam hal ini pengelola perpustakaan menyadari pentingnya undang-undang hak cipta untuk diterapkan agar tidak menimbulkan kerugian. Terkait masalah penggandaan koleksi pada perpustakaan baik itu dilakukan dengan cara *fotocopy* ataupun memotret, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta selama kegiatan tersebut dilakukan demi kepentingan penelitian dan pendidikan. Adapun hambatan implementasi undang-undang hak cipta dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka dari itu peneliti kemudian memberikan saran agar diadakan sosialisasi mengenai penerapan undang-undang hak cipta terhadap pemustaka demi meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah bagian dari HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta antara lain seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi. Hal ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 mengenai jenis-jenis ciptaan (Soelistyo, 2011:11).

Secara harfiah Hak Cipta berasal dari dua kata yaitu Hak dan Cipta. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “Hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal, pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Secara substansi pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang ada karena kekayaan intelektual tersebut adalah karena berkenaan dengan kognisi, yaitu kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia *the creation of the human mind* (Suwanto,2011:92).

Hak Kekayaan Intelektual atau bisa disingkat HAKI adalah persamaan kata dari *Intellectual Property Right*. Pelanggaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) berupa pembajakan, pemalsuan, dan penggandaan tanpa izin dalam konteks Hak Cipta dan merek dagang, dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan pada bidang ekonomi, terutama melukai si pemilik sah Hak Intelektual

tersebut. Hak cipta yang sering dijiplak dan dibajak di kalangan masyarakat, antara lain karya film, musik, merek, program komputer, dan buku. Dengan membajak atau mengonsumsi barang bajakan secara standar atau tidak, orang cenderung ingin mendapatkan sesuatu keuntungan secara instan bagi diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain karena mengabaikan adanya Hak Cipta (Riswandi,2009:8).

Sebagaimana dinyatakan oleh (Soelistyo,2011:93-94) bahwa setiap kelahiran suatu karya cipta baik dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi serta kemanfaatan. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan.

Saidin mengkategorikan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan, dalam bahasa Belanda Hak Kebendaan disebut “Zakelijk Recht” Prof. Sri Soedewi Masjcheon Sofwan (1981) dalam buku Saidin memberikan rumus tentang Hak Kebendaan, yakni “Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga” (Saidin,2003:48).

Berdasarkan bunyi pasal 15 huruf (a) tentang Undang-Undang Hak Cipta “penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta” seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an (Al-Baqarah:188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui”. (Departemen agama RI, 2009:29).

Selain itu dijelaskan pula dalam surah (Al Mutaffifin: 1)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang“. (Departemen agama RI, 2009:587).

Ayat di atas mengingatkan agar tidak memakai/menggunakan hak orang lain, dan memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan dari pemiliknya. Pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk Hak Cipta. Karya tulis harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak, dibakar atau disembunyikan penulisnya.

Pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran Hak Cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya. Di Indonesia seseorang dengan mudah dapat memfotocopy sebuah buku, padahal dalam buku tersebut melekat Hak Cipta yang dimiliki oleh

pengarang atau oleh yang ditunjuk oleh pengarang sehingga apabila kegiatan *fotocopy* dilakukan dan tanpa memperoleh izin dari pemegang Hak Cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Dilihat dari banyak pelanggaran Hak Cipta pada zaman seperti sekarang ini, contohnya memfotocopy karya cetak/koleksi tercetak. Hal ini tidak dibenarkan karena dapat merugikan pemegang Hak Cipta, akan tetapi ada sebab-sebab tertentu kenapa diperbolehkan, misalnya sudah mendapat izin dari pencipta atau memang terdesak kebutuhan hidup yang tidak mungkin membelinya asal tidak disalahgunakan dan diambil manfaatnya dan juga mencantumkan nama pengarangnya pada suatu karya ilmiah.

Apabila ada pihak yang sengaja melanggar hal tersebut maka akan dikenakan pidana berupa hukuman dan denda. Lagipula dalam Islam juga disebutkan bahwa hal itu sama dengan melakukan kejahatan besar seperti mencuri dan merampok hasil karya orang lain maka tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena pada saat observasi awal di Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar tampaknya perpustakaan ini sudah menerapkan undang-undang Hak Cipta seperti adanya kebijakan membatasi jumlah koleksi yang akan difotokopi pemustaka namun kebijakan yang dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya tidak terealisasi dengan baik.

Misalnya, kebijakan yang diterapkan oleh Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar adalah membatasi pemustaka untuk meminjam ataupun membawa pulang sebuah karya skripsi yang terdapat di perpustakaan, berdasarkan

hal tersebut sehingga akan berpeluang untuk terjadi pelanggaran HAKI, yakni pemustaka melakukan pelanggaran berupa memperbanyak hasil karya skripsi melalui kamera telepon genggam/*Handphone*. Meskipun setiap sudut ruangan terdapat kamera CCTV yang bertujuan untuk memantau segala aktivitas pemustaka, namun pada penerapannya pemustaka masih leluasa untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat judul ***Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar***. Untuk mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam melindungi hak cipta?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam melindungi hak cipta?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, terkait dengan judul ***“Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin makassar”***.

Adapun dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi seperti yang dijelaskan secara terperinci dalam pasal 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2002. Dalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Peneliti akan membatasi hanya pada karya cetak yang berada dalam perpustakaan, dan pasal 15 mengenai aturan tentang penggandaan (reproduksi) bahan pustaka, *fotocopy*, dan kegunaan karya ilmiah. Agar lebih fokus pada objek penelitian, peneliti lebih memfokuskan pada kebijakan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi, maka penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting dalam judul tersebut sebagai berikut:

- a) Penerapan (Implementasi), yaitu menyangkut hal-hal yang menjadi ketetapan. meliputi segala upaya yang diterapkan dalam lingkup Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar dalam memberdayakan dan melayangkan informasi, berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 pasal 12 dan pasal 15.
- b) Hak cipta, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak eksklusif dari pencipta untuk mengatur penggunaan ide, gagasan, serta hasil karyanya. Hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas suatu ciptaan berfungsi untuk mengontrol serta mengatasi penggandaan tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan kerugian.
- c) Kebijakan perpustakaan, yakni hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi segala kemungkinan yang dapat terjadi menyangkut pelanggaran hak cipta.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam melindungi hak cipta.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam melindungi hak cipta.
2. Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
 - a. Manfaat Ilmiah
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang kebijakan perpustakaan dalam melindungi hak cipta.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Peneliti
 Peneliti dapat menambah wawasan dan meningkatkan tentang UU Hak Cipta, agar peneliti dapat membedakan pelanggaran dan batas wajar.
 - 2) Bagi pimpinan Perpustakaan
 Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bijak bagi seorang pimpinan perpustakaan, untuk lebih memikirkan dan merumuskan konsep tentang kebijakan perpustakaannya.
 - 3) Bagi Pustakawan

Memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang bersangkutan, dalam melindungi Hak Cipta, sehingga dapat bertindak tegas terhadap nilai hukum dari suatu karya.

4) Bagi Pengguna Ciptaan

Adanya kesadaran setiap pengguna karya cipta, dalam memperoleh hak akses informasinya terhadap hak orang lain (pencipta).

5) Bagi Pencipta

Pencipta karya intelektual dapat memahami bahwa tugas perpustakaan adalah menyebarkan informasi, semata-mata untuk kepentingan akademik bukan komersial.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka akan mempermudah penelitian tentang implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sejumlah daftar bacaan yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai berikut:

1. Perpustakaan dan buku: Wacana Penulisan dan penerbitan, ditulis oleh Wiji Suwarno (2011) buku yang membahas mengenai Hak atas Kekayaan intelektual (HAKI).
2. Pengantar ilmu perpustakaan ditulis oleh Sulistiyo Basuki (1993) buku yang membahas tentang Hak Cipta. Buku tersebut membahas mengenai batasan-batasan Hak Cipta yang dijabarkan dalam UU sebagai kontrol bagi siapapun yang menerapkan Hak Cipta.
3. Undang-Undang HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual ditulis oleh Sinar Grafika (2009) buku ini membahas tentang Undang-Undang yang membahas tentang Hak Cipta.

4. Sebelumnya telah ada penelitian serupa yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Anik Rosidah dari Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Tahun 2013 dengan judul Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Implementasi

Pengertian implementasi secara etimologis, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* dalam kamus Webster *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menyimpulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa *”a procces of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps”* (Cleaves, 1990).

Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan *public* disebut “*policy delivery system*” (sistem penyampian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Mazmanian & Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) mendefenisikan implementasi sebagai berikut pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agutino (2006:139), mendefenisikan imlementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaa atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70), mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLoughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Aadapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (sinar grafika,2009:02). Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan yang hanya terdapat dalam pikiran, karena karya atau ciptaan harus memiliki bentuk, bersifat pribadi dan bersifat keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, keahlian sehingga cipta itu dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli untuk melakukan atas penggunaan invensi) karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur Hak Cipta biasanya hanya mencakup ciptaan hanya berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud dan terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mickey Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum (Suwarno,2011:94-95).

Di indonesia, Undang-undang Hak Cipta dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, dikenal dengan nama Auterswet 1912. Selama puluhan tahun Auterswet

menjadi bahan pedoman di Indonesia. Kemudian Auterswet dianggap ketinggalan zaman, tidak mampu menengani berbagai masalah yang timbul akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pada tahun 1982. Undang-undang Auterswet digantikan oleh Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982. Undang-Undang Hak Cipta 1982 tidak berumur panjang. Sebelum sempat dilaksanakan secara menyeluruh, undang-undang tersebut digantikan oleh undang-undang Hak Cipta 1987, dikenal dengan nama resmi undang-undang Nomor 7 tahun 1987. Kemudian undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, dan pada akhirnya dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2002 yang kini berlaku (Basuki,1993:103).

Adapun pasal 12 dan 15 yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 12

1. Dalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g) Arsitektur;
 - h) Peta;
 - i) Seni batik;
 - j) Fotografi;
 - k) Sinematografi;
 - l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan memperbanyak hasil karya itu. (Republik Indonesia, 2003:7).
- b. Pasal 15
- Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap pelanggaran hak cipta:
- a) Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

- b) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
 - c) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
 - d) Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
 - e) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - f) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
 - g) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
- (Republik Indonesia, 2003:8).

C. *Esensi Hak Ekonomi dan Hak Moral*

a. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. (Sinar Grafika, 2009:31).

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaannya hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan walaupun, misalnya Hak Cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain (Suwarno,2011:96-97).

Dalam buku yang ditulis oleh (Soelistiyo,2011:57-60) mengemukakan dalam khazanah ilmu pengetahuan, seni dan sastra tidak semua ciptaan dibuat dengan orientasi dan motif ekonomi. Adakalanya sebuah ciptaan dibuat sebagai sebuah ekspresi. Dedikasi pribadi bertema ritual, pemujaan atau bentuk-bentuk persembahan berdasar tradisi dan budaya leluhur. Ciptaan-ciptaan seperti ini bukan merupakan komoditi komersial yang bebas dieksploitasi.

Dari segi kepentingan pencipta atau pemegang Hak Cipta, suatu ciptaan dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk kemungkinan pemanfaatan nilai-nilai ekonominya. Bentuk-bentuk pemanfaatannya sangat beragam dan sangat tergantung pada jenis dan sifat ciptaan. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa eksploitasi dapat berlangsung dalam bentuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan.

Secara normatif, yang dimaksud dengan memperbanyak antara lain adalah menambah jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau

temporer. Adapun yang dimaksud dengan mengumumkan meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Sedangkan Hak Moral yaitu dalam konvensi Bern, masa berlakunya Hak Moral ditentukan sekurang-kurangnya sama dengan masa perlindungan Hak Ekonomi. Ini berarti, selama hidup pencipta dan berlaku 50 tahun setelah kematiannya. Dari segi substansi, hak moral sesungguhnya tidak memperoleh pengaturan secara memadai di awal penyusunan konvensi Bern. Fakta sejarah ini menggambarkan bahwa sejak awal lebih mengedepankan peraturan Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral baru diadopsi pada tahun 1982 ketika konvensi tersebut baru direvisi di Roma, Italia. Kenyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa Auterswet 1912 yang diberlakukan di Indonesia juga tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur Hak Moral secara memadai.

Pada dasarnya pengakuan terhadap Hak Moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi dari pencipta. Secara ringkas lingkup Hak Moral mencakup atribusi, integritas dan asosiasi. Ketiganya dapat dihapuskan tapi tidak bisa dialihkan. Meniadakan identitas pencipta misalnya dalam ciptaan yang dihasilkan bersama-sama dapat saja dilakukan sekedar untuk kepentingan keluwesan dalam menampilkan siapa penciptanya. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai kesepakatan para pencipta semuanya dan tidak ada niat buruk merugikan kepentingan salah satu atau beberapa pencipta lainnya, maka peniadaan nama pencipta dapat dilakukan.

Sebaliknya, mengalihkan identitas pencipta kepada pihak lain yang bukan pencipta, tidak dapat dilakukan. Pencipta dapat saja menggunakan nama samaran, tetapi tidak bisa menggunakan nama orang lain di atas nama dirinya sendiri sebagai pencipta.

D. Norma Pembatasan Hak cipta

a. Pembatasan Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan dan pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan pencantuman sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada, yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan

pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atau suatu ciptaan (sinar grafika,2009:39).

b. Batasan Hak Cipta di Perpustakaan

Undang-Undang Hak Cipta 1982 memberi izin bagi perpustakaan dan pusat dokumentasi untuk membuat *fotocopy* sebuah buku dengan beberapa ketentuan seperti, hasil *fotocopy* tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian tidak boleh diperjual belikan, dan dapat pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Karena banyak pemakai perpustakaan *fotocopy* untuk menggandakan buku (dalam arti luas) maka di beberapa perpustakaan selalu dipasang peringatan-peringatan tersebut menyatakan bahwa pembuat *fotocopy* adalah orang yang bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari proses *fotocopy* buku. Jadi, bukan perpustakaan yang bertanggung jawab (Basuki, 1993:107).

Walaupun Hak Cipta merupakan hak mutlak bagi pemegang Hak Cipta, dalam kehidupan sehari-hari tidaklah selalu demikian. Karena pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk melindungi pencipta dengan tidak merugikan masyarakat dan orang lain.

Praktek *fotocopy* yang dilakukan di perpustakaan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Di Belanda, misalnya ada ketentuan yang menyatakan bahwa perorangan boleh membuat *fotocopy* artikel singkat dan bagian kecil dari sebuah karya secara cuma-cuma. Bila *fotocopy* dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan harus membayar (Basuki,1993:108).

E. Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta 1982 menganggap pelanggaran Hak Cipta sebagai delik pengaduan artinya polisi baru bertindak bilamana ada pengaduan pihak yang dirugikan. Hal ini dianggap berat oleh berbagai pihak sehingga ketika Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 diperbaharui pada tahun 1987 maka delik padanya berubah. Kalau semula merupakan delik pengaduan maka menurut Undang-Undang Hak Cipta 1987 merupakan delik biasa. Ini berarti bahwa polisi akan bertindak walaupun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pelanggaran bagi pihak yang mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tanpa seizin pemegang Hak Cipta diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 7 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah. Pelanggaran terhadap penyiaran, memamerkan, mengedarkan atau mencetak ulang sebuah ciptaan diancam hukuman penjara sebanyak-banyaknya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah. Untuk ciptaan asing, Hak Ciptanya akan dilindungi dengan ketentuan:

- a. Diumumkan pertama kali di Indonesia
- b. Negara dan pemegang Hak Cipta asing mengadakan perjanjian bilateral dengan Republik Indonesia
- c. Negara dari pemegang Hak Cipta asing ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama dibidang Hak Cipta yang diikuti oleh Republik Indonesia (Basuki,1993:106).
- d. Pelanggaran Hak Cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tanggal 15 Februari 1984 yang dikutip oleh (Wigawati2011:2) dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni:

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan kedalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu dan notasi lagu.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan dimungkinkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan *piracy* (pembajakan) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/vodeo seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana Hak Cipta yang dilarang dalam Undang-Undang hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindari diri dari penangkapan kepolisian, para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik.

F. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit Rp.1.000.000,00 dan paling banyak 5M. Sementara, ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk musnahkan.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya (Suwarno,2011:98).

Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang RI. No. 19 Tahun 2002 Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima Miliar Rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.00.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 9, pasal 20 atau pasal 49 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) .
7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 72 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (Sinar Grafika, 2009:26-27).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang penerapan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. *Waktu dan Tempat Penelitian*

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017 di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di kampus II UIN Alauddin Samata, Gowa.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

a. Sejarah Singkat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar didirikan pada tanggal 10 November 1965 bersamaan diresmikan IAIN Alauddin Makassar. Sesuai dengan surat Menteri Agama Republik Indonesia 74 tentang berdirinya IAIN Alauddin Makassar.

Tujuan dibentuknya perpustakaan IAIN Alauddin Makassar adalah untuk menunjang program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ruang perpustakaan pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1967 bertempat disebelah selatan gedung Universitas Muslim Islam (UMI) Jalan Kakatua tepatnya disatu ruangan kantor Sekolah persiapan IAIN pertengahan tahun 1967, IAIN Alauddin Makassar pindah kejalan Timur Biosko AA dilantai tiga.

Pada tahun 1973 IAIN Alauddin Makassar pindah lagi kejalan Sumba Perpustakaan menempati lantai dasar. Memasuki tahun 1974 IAIN Alauddin Makassar pindah kejalan Gunung Sari dan kemudian ke jalan Sultan Alauddin Makassar.

Perpustakaan menempati gedung Syariah salah satu ruangan kuliah berada di lantai dua. Tenaga perpustakaan sudah berjumlah tiga orang yaitu seorang kepala perpustakaan dan dua orang staf. Namun pada akhir 1975 perpustakaan mengalami kebakaran diakibatkan oleh arus listrik. Kemudian pada tahun 2004 perpustakaan IAIN Alauddin Makassar kembali pindah kegedung berlantai tiga.

Perpustakaan IAIN Alauddin Makassar mengalami pergantian kepala perpustakaan pada bulan November 2008 dari bapak A. Ibrahim kepada ibu Nursia sebagai caretaker hingga bulan Mei sebelum dilakukan pemilihan ulang kepala perpustakaan baru. Pada saat itu terjadi perubahan besar-besaran karena sesuatu dan lain hal. Selama kepemimpinan pejabat caretaker ibu Nursia Hamid melakukan beberapa perubahan seperti letak penitipan barang diletakkan dilantai dua.

Kemudian pada tanggal 10 November 2009, maka dilantiklah kepala perpustakaan baru yaitu bapak Irvan Mulyadi, selama kepemimpinannya beberapa perubahan, seperti penempatan pegawai perpustakaan sesuai dengan kompetensi atau latar belakang pendidikan masing-masing.

Pada tahun 2011 perpustakaan UIN Alauddin Makassar pindah ke kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Kab. Gowa. Sejak itulah perpustakaan mulai berubah diri serta mengejar ketertinggalan seperti suatu program bekerjasama dengan orang-orang Teknologi Informatika (TI) dan sekarang program tersebut sudah mulai bejalan akan tetapi belum maksimal.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2013 dipilihlah Ibu Himayah, S.Ag., SS., MIMS. Sebagai kepala perpustakaan periode 2013 sampai masa jabatan berakhir, selama beberapa bulan kepemimpinannya dilakukan beberapa perubahan seperti bidang struktur orgainasasi dan penempatan tugas pegawai perpustakaan. Kemudian pada tanggal 10 November 2015 sampai saat ini Perpustakaan UIN Alauddin Makassar mengalami renovasi bangunan yang merupakan agenda pimpinan baru yaitu bapak Muh. Quraissy Mathar.

Pada prinsipnya semua kegiatan yang dilakukan di perpustakaan ditujukan untuk pengguna perpustakaan. Kegiatan perpustakaan merupakan kegiatan layanan atau jasa yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

b. Jenis Layanan yang disediakan Oleh Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Yaitu:

1. Layanan Orientasi Perpustakaan (Pendidikan Pemustaka).

Layanan ini satu kegiatan jasa pemandu dari perpustakaan yang memberikan suatu ilmu keterampilan dan tata cara untuk menggunakan perpustakaan sehingga pemustaka dapat lebih mengoptimalkan penggunaan jasa perpustakaan dengan cepat dan tepat.

2. Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan).

Layanan ini merupakan kegiatan yang mencakup semua bentuk pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi dengan cepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna jasa perpustakaan, baik itu peminjaman maupun pengambilan bahan pustaka.

3. Layanan Referensi

Layanan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dipergustakaan yang khusus melayani atau menyajikan koleksi referensi kepada para pemustaka atau pengunjung perpustakaan (layanan buku-buku referensi, seperti: kamus, ensiklopedi, statistik, dll.).

4. Layanan Deposit

Layanan deposit dilakukan dengan cara mewajibkan seluruh civitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa untuk

menyerahkan seluruh hasil karya ilmiahnya. Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan skripsi baik tercetak maupun digital ke perpustakaan Universitas (wajib simpan karya ilmiah, seperti: skripsi, tesis, disertasi, makalah).

5. Layanan Koleksi Audio Visual (Layanan Nonbuku).

Selain koleksi buku-buku fisik pada perpustakaan ini menyediakan koleksi audio visual sebagai penunjang proses belajar mengejar dan disertai dengan sarana pelengkapanya.

6. Layanan Foto copy

Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna perpustakaan yang ingin mengcopy sebagian bahan pustaka, referensi-referensi, dan lain sebagainya. Sehingga pengguna dapat memperoleh informasi tanpa harus meminjam atau membawa keluar perpustakaan terutama untuk koleksi referensi yang tidak dipinjamkan.

7. Layanan Internet atau *Wifi*

Perpustakaan menyediakan fasilitas internet yang dapat dimanfaatkan pengguna perpustakaan dalam memperoleh informasi untuk memanfaatkan layanan internet pemustaka dapat langsung keruang internet. Akan tetapi, jika pengunjung perpustakaan membawa laptop atau notebook dapat langsung mengakses internet menggunakan jaringan *wifi* yang tersedia di setiap lantai perpustakaan.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari informan yaitu kepala perpustakaan dan pustakawan pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan memberikan sejumlah pertanyaan sebagai instrumen penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer berupa dokumen-dokumen atau laporan yang dapat mendukung pembahasan dalam kaitannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode penelitian lapangan (field research), yakni metode yang penulis gunakan untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Estenberg (dalam Sugiyono, 2010:217), menyatakan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan teknik penulis melakukan wawancara langsung atau bertatap muka terhadap informan agar menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dengan tujuan mendapatkan data yang semaksimal mungkin. Dengan teknik pengumpulan data ini memberikan pernyataan langsung kepada pihak-pihak yang berwenang dalam Perpustakaan

Kampus II UIN Alauddin Makassar menyangkut data yang mendukung penelitian ini.

2. Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiono.2010:310), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses. Sedangkan menurut Sarwono (2006:224), observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

3. Dokumentasi, yakni digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi resmi yang terkait dengan Penerapan Undang-Undang Hak Cipta di Kampus II UIN Alauddin Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti dengan menggunakan alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Pedoman wawancara, yaitu peneliti membuat petunjuk wawancara untuk memudahkan peneliti dalam berdialog dan mendapatkan data tentang bagaimana Penerapan Undang-Undang Hak cipta di Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar. Dalam pelaksanaan teknik wawancara harus memperhatikan beberapa faktor antara lain meminta jawaban dari *informan*. Dalam hal ini kepala perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar dengan bertatap muka melalui wawancara.

2. *Tape Recorder* (perekam suara), yaitu alat yang penulis gunakan untuk merekam percakapan dengan narasumber saat melakukan wawancara sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat dan objektif. Dalam hal ini penulis menggunakan *handphone* untuk merekam pembicaraan tersebut nantinya.
3. Kamera *handphone* yaitu alat yang penulis gunakan untuk melakukan dokumentasi sehingga informasi yang berbentuk catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Penerapan Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal ini penulis rekam dalam bentuk foto.

F. Teknik analisis dan pengolahan data

Analisis data merupakan merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan Transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain (Emzir,2010:85).

Analisis data bermaksud mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya di angkat menjadi teori substantif (Meleong,2013:280).

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu analisis data kualitatif yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2008:89).

Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh (Syihabuddin,2013:31) menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif yakni:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi yang berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Hak Cipta di Kampus II UIN Alauddin Makassar.

2. Penyajian Data (Data Display)

Pada penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan agar dapat dihasilkan temuan dan interpretasi data yang absah dan dapat diterima semua pihak. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain (Sugiyono, 2013:367):

1. Uji kredibilitas, data dalam penelitian kualitatif terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, analisis kasus negatif, menggunakan referensi dan mengadakan *member check*. dalam hal ini peneliti menggunakan bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti contoh data wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara atau gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto.
2. Uji *Transferability*, dalam hal ini peneliti dalam membuat laporannya diharuskan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil penelitiannya agar orang lain yang ingin menerapkan hasil penelitian tersebut dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitiannya tersebut di tempat lain.
3. Uji *Dependability*, dilakukan dengan cara melakukan seluruh audit terhadap keseluruhan proses penelitian, yaitu mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian mulai dari peneliti menentukan masalah, sampai peneliti membuat kesimpulan.

4. Uji *Konfirmability*, yaitu menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *Konfirmability*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara terhadap 2 orang informan. Berikut adalah daftar nama dan jabatan informan:

Tabel 4.1

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Muh. Quraisy Mathar	Kepala Perpustakaan	Informan I
2	Zaenal	Pustakawan	Informan II

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di perpustakaan UIN Alauddin Makassar, maka peneliti menguraikan hasil wawancara berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No 19 Tahun 2002 di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dalam Melindungi Hak Cipta.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Juni 2017 terhadap informan I mengenai implementasi UU hak cipta di perpustakaan UIN Alauddin Makassar menurutnya:

“Undang-undang hak cipta sebetulnya untuk melegalisasi, melindungi seseorang baik person ataupun kelompok yang memiliki sebuah karya. Belakangan kemudian hal itu juga menjalar ke wilayah yang sifatnya non fisik seperti buku, lagu, film, kemudian diperuntukkan untuk melindungi pembajakan atau plagiat, penerapannya untuk saat ini, kita sementara ini mengusulkan software untuk melakukan deteksi plagiat, yang pertama untuk melindungi karya hak ciptaan seseorang, sekaligus juga untuk mengedukasi orang yang melakukan plagiat”.

Selanjutnya peneliti juga memperoleh informasi tentang implementasi undang-undang no 19 tahun 2002 di perpustakaan UIN

Alauddin Makassar dalam melindungi hak cipta dari informan II menurutnya:

“Sejauh ini pada saat kita memberikan kesempatan pada mahasiswa atau pemustaka yang lain apakah dia dari kampus ini atau dari luar biasanya kalau skripsi, tesis dan disertasi itu kita batasi jumlahnya, salah satu tujuan kami adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta”.

Dari pemaparan kedua informan tersebut kemudian peneliti menyimpulkan bahwa pihak pengelola perpustakaan menyadari pentingnya implementasi undang-undang hak cipta yang memiliki peran untuk melegalisasi, melindungi seseorang baik person ataupun kelompok yang memiliki sebuah karya, dalam hal ini meliputi karya yang ada di perpustakaan UIN Alauddin Makassar berupa koleksi, buku-buku maupun karya ilmiah.

Adapun hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu terkait kegiatan mahasiswa dalam *fotocopy* dan memotret koleksi maupun buku-buku yang ada di perpustakaan ini, dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya pelanggaran hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian kemudian peneliti memperoleh informasi berikut dari informan I yaitu:

“Dalam hal ini salinan fotocopy yaitu hanya perbagian kecil dari isi buku jika dia tercetak, itu juga bukan dalam kaitan pelanggaran hak cipta karna yang disebut dengan pelanggaran hak cipta ketika orang mengambil kemudian melakukan penjualan, tetapi jika fotocopy selama masih kepentingan penelitian atau pengajaran maka sah-sah saja”.

“Mengenai himbauan dilarang memotret yang terpasang pada tembok perpustakaan, sebetulnya saya lebih memilih mereka memotret dibanding mereka kemudian berfikir seperti model lama yang kemudian karna dilarang memotret maka mereka merobek, sebaiknya mereka tidak usah dilarang memotret, yang penting buku tersebut tetap utuh dan bisa digunakan oleh orang berikutnya”.

Sama halnya dengan informasi yang diperoleh dari informan II beliau beranggapan bahwa:

“kalau memperbanyak, selama itu tujuan pendidikan dan penelitian dan bukan tujuan komersial, saya kira itu tidak ada masalah dan itu kita berikan kesempatan pada pemustaka untuk memfotocopy namun dibatasi maksimum sampai sekian lembar, tujuannya itu untuk menjaga keaslian ataukah menghindari plagiat-plagiat karya tulis ilmiah mahasiswa”.

Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 15 huruf e yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika memperbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penerapan undang-undang sudah sesuai dengan peraturan undang-undang hak cipta yakni undang-undang nomor 19 tahun 2002 karna pengelola perpustakaan UIN Alauddin Makassar sudah melindungi koleksi tercetaknya yakni dengan tidak mengizinkan pemustaka memfotocopy koleksi dengan bebas. Sedangkan kegiatan menggandakan dengan cara memotret dianggap tidak menjadi pemicu terjadinya plagiat ataupun pelanggaran hak cipta, selama hal tersebut demi kepentingan penelitian dan pendidikan. Oleh karna itu pustakawan hendaknya juga memahami tentang undang-undang ini, serta bijak dalam memanfaatkan informasi yang telah disediakan di perpustakaan ini. Adapun penyediaan layanan fotocopy di perpustakaan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna atau pemustaka, hal tersebut didasari bahwa penyediaan

buku di perpustakaan tidak akan dapat mengimbangi jumlah pengguna yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya.

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan yang masih berkaitan dengan implementasi undang-undang hak cipta yaitu bagaimanakah kebijakan perpustakaan UIN Alauddin Makassar dalam mengelola dan melayangkan sumber informasinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu informan, ia menegaskan bahwa:

“Perpustakaan sebetulnya dalam hal publikasi dia menjadi lembaga yang bebas nilai, maksudnya seperti ini karna perpustakaan tidak pada wilayah rana hukum yang menentukan apakah buku ini bajakan, apakah buku ini sudah digandakan kemudian dijual, perpustakaan ini hanya mengelola distribusi koleksi buku yang masuk kemudian dilayangkan, dipinjamkan, dipublikasikan dan seterusnya”.

Kemudian informan selanjutnya juga memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, yaitu:

“Yang memberikan sanksi pelanggaran hak cipta bukan domainnya perpustakaan, mungkin dia termasuk ke dalam ranah yang lain, bisa saja masuk ke hukum pidana atau perdata”.

Keterangan dari kedua informan tersebut kemudian dapat dipahami bahwa perpustakaan sebagai tempat mengelola dan melayangkan sumber informasi tercetaknya namun pada kasus plagiat ataupun pelanggaran hak cipta sebenarnya bukanlah wewenang dari perpustakaan, melainkan hal tersebut termasuk ke dalam ranah hukum.

Adapun pihak yang bertanggung jawab atau berkepentingan dengan hal yang sifatnya plagiat itu adalah penerbit, maupun person-person atau pelaku yang menggandakan, meskipun hal tersebut terjadi pada ruang lingkup perpustakaan, namun perlu diketahui bahwa perpustakaan bukan lembaga hukum sehingga perpustakaan hanya akan

memberikan keterangan-keterangan ketika kemudian lembaga menemukan hal tersebut. Selanjutnya mengenai apa saja koleksi tercetak di perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang dilindungi hak cipta?

“Semua hasil koleksi yang ada di perpustakaan UIN Alauddin Makassar baik yang ada dilayanan umum, sirkulasi dan referensi”.

Terkait mengenai implementasi undang-undang no 19 tahun 2002 tentang hak cipta di perpustakaan UIN Alauddin Makassar, peneliti ingin mengetahui apakah ada sosialisasi atau pengumuman di perpustakaan tentang undang-undang ini?

“Sosialisasi untuk saat ini belum ada, karna dia menjadi undang-undang secara umum/secara nasional jadi sebenarnya bukan hanya perpustakaan ini, konteksnya berlaku untuk apa saja termasuk hal-hal yang sifatnya bukan buku”.

Salah satu informan juga memberikan keterangan terkait pengadaan sosialisasi ataupun pengumuman tentang undang-undang hak cipta di perpustakaan ini bahwa:

“Selama ini belum ada sosialisasi ataupun pengumuman terkait dengan penerapan undang-undang hak cipta, namun yang saya ketahui selama ini pengelola perpustakaan memberikan himbauan ataupun peringatan secara lisan terhadap pemustaka yang akan melakukan fotocopy”.

Setelah melakukan wawancara terhadap kedua informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada informasi yang disampaikan kepada pemustaka terkait sosialisasi ataupun pengumuman tentang undang-undang hak cipta. Namun lebih diprioritaskan terhadap penerapannya secara praktis, seperti halnya peringatan yang dilakukan oleh pihak pengelola kepada pemustaka untuk membatasi fotocopy terhadap karya ilmiah di perpustakaan ini. Hal

tersebut merupakan upaya untuk menetralsir ataupun mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui harapan tentang adanya undang-undang hak cipta terhadap koleksi di perpustakaan ini, dengan melakukan wawancara kepada informan I beliau menyampaikan harapannya terkait undang-undang tentang hak cipta, yaitu:

“Orang-orang semakin menghargai karya seseorang dengan adanya hak cipta seseorang harus melatih dirinya berfikir bahwa ternyata orang membutuhkan modal, semangat, ruang dan waktu untuk membuat suatu karya sehingga tidak sedemikian gampang kita mencuri. Kita harus berlatih menghargai karya seseorang sejelek apapun karya orang”.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang no. 19 tahun 2002 di perpustakaan UIN Alauddin Makassar maka peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Hak Cipta diperuntukkan untuk melindungi sebuah karya dari tindakan pembajakan atau plagiat. Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana Hak Cipta yang dilarang dalam Undang-Undang hak Cipta. Yang memberikan sanksi pelanggaran Hak Cipta bukan domainnya perpustakaan, melainkan termasuk ke dalam ranah yang lain, bisa saja termasuk dalam hukum pidana, sebagaimana menurut Undang-Undang Hak Cipta 1897 merupakan delik biasa. Ini berarti bahwa polisi akan bertindak walaupun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran bagi pihak yang mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tanpa seizin pemegang Hak Cipta diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 7 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah.

2. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dalam Melindungi Hak Cipta.

Dalam menerapkan undang-undang no 19 tahun 2002 di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses implementasi undang-undang tersebut, dan untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara informan I beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Kalau hambatan yang paling pertama itu adalah manusia yang selalu menjadi persoalan. Manusia itu harus diedukasi secara pribadi, sesuai tuntutan negri yang semakin maju sebuah pendidikan suatu negara dan sebuah masyarakat pasti akan berimplikasi terhadap penghargaan hak cipta”.

“Akses yang dimiliki masyarakat dan kemampuan ekonomi, selain itu edukasi pendidikan rendah, maksudnya bukan tingkat pendidikannya, bisa saja sekolahnya perguruan tinggi tapi pola pikirnya rendah sehingga tidak menghargai syariat masyarakat”.

Peneliti juga memperoleh informasi mengenai hambatan dalam implementasi undang-undang hak cipta dari informan ke II yang menyatakan bahwa:

“Hal itu didukung oleh perangkat IT yang semakin maju dan teknologi komunikasi termasuk Hp (Handphone) sehingga untuk mengakses jurnal atau sumber-sumber referensi biasanya orang-orang menggunakan akses melalui smartphonanya”.

Berdasarkan pemaparan dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam

implementasi undang-undang hak cipta. Beberapa faktor tersebut peneliti menguraikannya sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, yang termasuk di dalamnya yaitu tingkat pengetahuan dari pemustaka. Ketidaktahuan pengguna tentang hak cipta dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud yakni menggandakan buku ataupun karya ilmiah secara keseluruhan.
2. Pendidikan, yaitu tingkat edukasi rendah, maksudnya bukan tingkat pendidikannya, bisa saja sekolahnya perguruan tinggi tapi pola pikirnya rendah sehingga tidak menghargai syariat masyarakat dan rentang melakukan plagiat ataupun hal-hal lainnya yang melanggar undang-undang hak cipta.
3. Teknologi, hal ini didukung oleh perangkat IT yang semakin maju hal tersebut turut berperan dalam akses informasi, misalnya pada perpustakaan UIN Alauddin Makassar saat ini telah diberlakukan sistem repositori dalam upaya mewujudkan publikasi karya ilmiah dengan jaringan yang luas.
4. Faktor ekonomi, yaitu sebagaimana keterangan yang diberikan oleh informan 1 bahwa “tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan harga buku yang masih cukup tinggi untuk standar nasional maka banyak orang yang berpikir pendek bahwa daripada membeli mending mencuri karya” (Muh. Quraisy Mathar, 20 Juni 2017).

Demikianlah hambatan-hambatan dalam implementasi undang-undang hak cipta yang peneliti peroleh dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, selanjutnya peneliti ingin mengetahui hal apa yang

perlu dilakukan pengelola perpustakaan dalam menanggulangi tindakan pelanggaran hak cipta (menggandakan dengan cara fotocopy atau memotret)?

“Mengenai himbauan dilarang memotret yang terpasang pada tembok perpustakaan, dengan meningkatnya atau berkembangnya informasi teknologi memotret itu sudah agak sulit untuk dilarang, misalnya dulu kita punya mahasiswa, masih IAIN itu sekitar 4000an dengan jumlah koleksi sekitar 20.000 sekarang dua kali lipat koleksi kita 40.000 tetapi jumlah mahasiswanya 5 kali lipat, semakin tidak pernah cukup jumlah mahasiswa dengan jumlah buku yang ada, kita butuh ruangan yang lebih besar dan koleksi yang lebih banyak, serta pengelola yang lebih banyak. Maka tentu memotret tidak lagi menjadi sebuah keharaman begitu sebetulnya”.

Dari hasil wawancara terhadap informan I ditarik kesimpulan bahwa kegiatan menggandakan karya baik dengan cara fotocopy ataupun memotret merupakan hal yang sulit untuk dihindari, mengingat bahwa penyediaan buku di perpustakaan tidak selalu dapat mengimbangi jumlah pengguna yang besar. Dengan demikian *fotocopy* maupun memotret di perpustakaan ini di anggap sebagai hal yang lumrah, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana peraturan tentang undang-undang hak cipta yang memperbolehkan kegiatan menggandakan dengan syarat kepentingan penelitian dan pendidikan, dan karya yang digandakan tersebut tidak secara keseluruhan.

Meskipun berbagai cara dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, namun tetap saja selalu ada ruang-ruang yang menjadi celah bagi orang-orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar, dengan mewancarai salah

informan I tentang bagaimana alur kerja dalam pemberian sanksi untuk implementasi?

“Tidak ada sanksi, karna perpustakaan kan bukan lembaga hukum, kemudian misalnya terindikasi terjadi pelanggaran di perpustakaan, kemudian kita selaku pengelola perpustakaan akan memberikan keterangan saja bahwa seperti itu, tapi sanksi hukumnya tidak ada”.

Peneliti juga memperoleh informasi dari informan II yang memberikan keterangan yang serupa bahwa:

“Perpustakaan memberikan sanksi hukuman kepada pemustaka atau user, pertama karna mereka terlambat mengembalikan buku yang dipinjam, yang kedua menghilangkan buku atau merusak, kalau dia terlambat maka harus membayar denda, kemudian menghilangkan buku maka diganti dengan buku yang sama, kalau merusak harus mengganti buku lalu diserahkan kepada pihak perpustakaan, tapi kalau sanksi pelanggaran hak cipta saya kira bukan termasuk ke wilayah perpustakaan”.

Dari kedua keterangan informan kemudian peneliti menyimpulkan bahwa implementasi undang-undang hak cipta di perpustakaan ini telah diterapkan, namun pada kasus pelanggaran hak cipta bukanlah wewenang dari pihak perpustakaan untuk memberikan sanksi. Hal tersebut akan ditangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Hak Cipta maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia, pendidikan, teknologi serta ekonomi merupakan faktor-faktor yang menghambat implementasi undang-undang hak cipta di perpustakaan ini. Sedangkan kegiatan menggandakan karya baik dengan cara fotocopy ataupun memotret merupakan hal yang sulit untuk dihindari, mengingat bahwa penyediaan buku di perpustakaan tidak selalu dapat mengimbangi jumlah pengguna yang besar. Dengan demikian *fotocopy* maupun memotret di perpustakaan ini di anggap sebagai hal yang lumrah, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana

peraturan tentang undang-undang hak cipta yang memperbolehkan kegiatan menggandakan dengan syarat kepentingan penelitian dan pendidikan, dan karya yang digandakan tersebut tidak secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 15 huruf e yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika memperbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang No 19 Tahun 2002 di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dalam Melindungi Hak Cipta.

a. Pengetahuan Tentang Undang-Undang Hak Cipta

Undang-undang hak cipta adalah sebuah sistem yang berkontribusi dalam upaya perlindungan terhadap keaslian atau kepemilikan sebuah karya, dalam hal ini mencakup karya-karya yang berada dalam lingkup perpustakaan seperti koleksi buku-buku, karya ilmiah serta karya lainnya. Undang-undang ini sangat berperan dalam mencegah kegiatan-kegiatan plagiaris yang seringkali merugikan seseorang.

b. Penerapan UU No 19 Tahun 2002 di Perpustakaan

Undang-undang ini sangat bermanfaat namun pada penerapannya belum bisa dikatakan efektif karena masih ada sejumlah pemustaka di perpustakaan ini yang belum mengetahui tentang undang-undang tersebut. Bahkan kemungkinan setiap pemustaka dapat

berpeluang melakukan pelanggaran hak cipta karna kurangnya pemahaman akan undang-undang ini.

c. *Apa Saja Koleksi Tercetak di Perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta*

Mengenai koleksi yang dilindungi hak cipta yakni semua karya yang terdapat di perpustakaan. Setiap pencipta memiliki hak legalisasi terhadap karyanya, oleh sebab itu setiap karya harus dilindungi.

d. *Pendapat Tentang Kebijakan Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar Terkait dengan Hak Cipta Dalam Mengelola dan Melayangkan Sumber Informasi Tercetaknya*

Pihak pengelola perpustakaan ini telah menerapkan kebijakan yang terkait hak cipta yakni memberi izin bagi pemustaka dalam membuat *fotocopy* sebuah buku dengan beberapa ketentuan seperti, hasil *fotocopy* tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian tidak boleh diperjualbelikan, dan dapat pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

e. *Kebijakan Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar Terkait Dengan Membuat Salinan (fotocopy) yang Merupakan Pelanggran Hak Cipta*

Membuat salinan *fotocopy* tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, hal tersebut hanya berlaku pada pemustaka yang paham dan mengerti mengenai kebijakan tentang undang-undang hak cipta saja, sedangkan bagi pemustaka yang belum mengetahui tentang undang-undang ini maka akan berpeluang untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

f. Apakah Ada Sosialisasi Atau Pengumuman di Perpustakaan Tentang Undang-Undang Ini

Sebagai salah satu pemustaka di perpustakaan ini saya belum pernah mendengar tentang pengumuman ataupun sosialisasi mengenai undang-undang hak cipta. Saya sendiri mengetahui tentang undang-undang ini dari proses perkuliahan. Banyak pemustaka lain yang belum mengetahui hal tersebut yang kemudian rentan untuk melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya pelanggaran hak cipta. Seharusnya pihak perpustakaan menerapkan alternatif ini di perpustakaan agar pemustaka lainnya menjadi paham akan dampak yang dapat timbul bila menyepelekan undang-undang ini yang bahkan bisa sampai ke dalam ranah hukum.

g. Bagaimana Pengawasan Karya Ilmiah di Perpustakaan?

Karya ilmiah termasuk dalam bagian dari koleksi perpustakaan yang menjadi pengawasan pihak pengelola perpustakaan seperti adanya kebijakan untuk membatasi jumlah koleksi yang akan difotocopy oleh pemustaka namun kebijakan yang dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya tidak terealisasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut sehingga akan berpeluang untuk terjadi pelanggaran hak cipta, yakni pemustaka melakukan hal-hal yang termasuk pelanggaran berupa memperbanyak hasil karya skripsi ataupun karya ilmiah lainnya melalui kamera telepon genggam atau *handphone*.

h. Harapan Dengan Adanya Hak Cipta

Dengan adanya hak cipta sehingga dapat melindungi sebuah karya dan pemiliknya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan merealisasikan undang-undang ini diharapkan pihak pengelola perpustakaan maupun pustakawan dapat bekerjasama dalam hal menjaga keaslian sebuah karya yang ada di perpustakaan ini.

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi undang-undang hak cipta no. 19 tahun 2002 di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perpustakaan sebagai pusat untuk melayangkan karya maupun koleksi tercetaknya, maka dari itu implementasi undang-undang hak cipta sangat diperlukan untuk melindungi karya-karya tersebut dari kegiatan plagiasi maupun hal lainnya yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini sangat bermanfaat namun pada penerapannya belum bisa dikatakan efektif karna masih ada sejumlah pemustaka di perpustakaan ini yang belum mengetahui tentang undang-undang tersebut. Maka dari itu perlu adanya informasi yang lebih signifikan mengenai ketentuan undang-undang hak cipta di perpustakaan agar pemustaka dapat terhindar dari hal-hal yang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Dalam Melindungi Hak Cipta.

a. Pengalaman Tentang Pelanggaran Hak Cipta yang Terjadi di Perpustakaan

Selama ini belum ada kasus serius yang terjadi terkait pelanggaran hak cipta di perpustakaan ini, namun ada banyak hal yang dapat memicu terjadinya pelanggaran tersebut baik hal itu berasal dari pemustaka ataupun pengelola perpustakaan.

b. Apa Saja Kendala Dalam Menerapkan Undang-Undang Hak Cipta

Yang menjadi kendala dalam menerapkan undang-undang ini bukan saja berasal dari subjek atau pemustaka tetapi dalam hal ini

perlu diingat bahwa penyediaan buku di perpustakaan tidak selalu dapat mengimbangi jumlah pengguna yang besar.

c. *Hal yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta*

Adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu minimnya informasi mengenai undang-undang hak cipta di kalangan pustakawan. Tindakan pelanggaran hak cipta tidak akan mudah untuk dicegah, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara menghindari berbagai hal yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut.

d. *Tindakan Terhadap Pemustaka yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta*

Pemustaka bisa saja melakukan pelanggaran hak cipta secara tidak sengaja, dan apabila hal tersebut terjadi maka tindakan yang harus dilakukan terhadap pemustaka tersebut adalah dengan memberikan peringatan terkait implementasi undang-undang hak cipta sehingga pemustaka tersebut dapat memahami apa saja yang menjadi batasan-batasan hak cipta, sehingga pemustaka tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama.

e. *Hal yang Perlu dilakukan Pengelola Perpustakaan Dalam Menanggulangi Tindakan Pelanggaran Hak Cipta*

Tindakan yang perlu dilakukan dalam menanggulangi tindakan pelanggaran hak cipta yaitu pengelola perpustakaan harus mensosialisasikan informasi tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta serta memberikan peringatan bagi setiap pustakawan agar tidak melakukan hal-hal yang termasuk pelanggaran hak cipta.

f. Alur Kerja Dalam Pemberian Sanksi Untuk Implementasi

Dalam pemberian sanksi terkait implementasi undang-undang hak cipta secara hukum akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kalau semula pelanggaran hak cipta merupakan delik pengaduan maka menurut Undang-Undang Hak Cipta 1997 merupakan delik biasa. Ini berarti bahwa polisi akan bertindak walaupun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa undang-undang hak cipta no. 19 tahun 2002 sekilas tampak sepele namun perlu untuk diketahui bahwa dampak yang ditimbulkannya cukup serius karna dapat menjerumuskan seseorang sampai pada ranah hukum. Pelanggaran hak cipta merupakan hal yang sulit dicegah namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara mengetahui batasan-batasan dalam hak cipta. Yang perlu diingat bahwa dalam proses menggandakan baik dengan cara *fotocopy* maupun memotret sebuah karya maka harus mencantumkan penciptanya. Kemudian dengan cara menyebarluaskan informasi tentang undang-undang hak cipta maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Penerapan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta pada Perpustakaan UIN Alauddin Makassar” penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta pada Perpustakaan UIN Alauddin Makassar telah diterapkan, dalam hal ini pengelola perpustakaan menyadari pentingnya undang-undang hak cipta untuk diterapkan agar tidak menimbulkan kerugian. Sangat penting bahwa apabila pihak pengelola mengerti tentang tanggung jawab tersebut maka kemudian pihak-pihak yang dimaksud juga akan menginformasikan hal tersebut terhadap pemustaka yang datang berkunjung. Terkait masalah penggandaan koleksi pada perpustakaan baik itu dilakukan dengan cara *fotocopy* ataupun memotret, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta selama kegiatan tersebut dilakukan demi kepentingan penelitian dan pendidikan. Tidak ada larangan untuk menggandakan suatu karya yang ada di perpustakaan namun demi mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta maka hal tersebut diminimalisir dengan pertimbangan bahwa karya yang digandakan tersebut dibatasi sebanyak dua eksemplar. Selain itu perlu diperhatikan bahwa apabila ingin mengutip karya seseorang maka harus menyertakan nama pengarangnya. Seorang pemustaka harusnya paham akan hal tersebut dan menghindari pelanggaran yang dimaksud.
2. Hambatan perpustakaan UIN Alauddin Makassar dalam menerapkan undang-undang hak cipta disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, pendidikan, teknologi dan ekonomi. Beberapa hal tersebut

merupakan pemicu terjadinya pelanggaran hak cipta, Beberapa faktor yang menjadi hambatan implementasi undang-undang hak cipta tersebut peneliti menguraikannya sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia, yang termasuk di dalamnya yaitu tingkat pengetahuan dari pemustaka. Ketidaktahuan pengguna tentang hak cipta dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud yakni menggandakan buku ataupun karya ilmiah secara keseluruhan.
- 2) Pendidikan, yaitu tingkat edukasi rendah, maksudnya bukan tingkat pendidikannya, bisa saja sekolahnya perguruan tinggi tapi pola pikirnya rendah sehingga tidak menghargai syariat masyarakat dan rentang melakukan plagiat ataupun hal-hal lainnya yang melanggar undang-undang hak cipta.
- 3) Teknologi, hal ini didukung oleh perangkat IT yang semakin maju hal tersebut turut berperan dalam akses informasi, misalnya pada perpustakaan UIN Alauddin Makassar saat ini telah diberlakukan sistem *repository* dalam upaya mewujudkan publikasi karya ilmiah dengan jaringan yang luas.
- 4) Faktor ekonomi, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan harga buku yang masih cukup tinggi untuk standar nasional maka banyak orang yang berpikir pendek bahwa daripada membeli mending mencuri karya.

Sebagaimana peraturan tentang undang-undang hak cipta yang membolehkan kegiatan menggandakan dengan syarat kepentingan penelitian dan pendidikan dan karya yang digandakan tidak secara keseluruhan. Namun pada penerapannya kegiatan menggandakan karya baik dengan cara *fotocopy* ataupun

memotret merupakan hal yang sulit untuk dihindari, meskipun berbagai cara dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, namun tetap saja selalu ada ruang-ruang yang menjadi celah bagi orang-orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

Implementasi undang-undang hak cipta di perpustakaan ini telah diterapkan, namun pada kasus pelanggaran hak cipta bukanlah wewenang dari pihak perpustakaan untuk memberikan sanksi. Melainkan hal tersebut akan ditangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum.

Demikian tentang implementasi undang-undang hak cipta, yang perlu diketahui bahwa kegiatan menggandakan suatu karya baik itu dengan cara memotret atau fotocopy tidak disebut sebagai pelanggaran selama hal tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, dan perlu diperhatikan saat mengutip sebuah karya harusnya menyertakan nama pengarang. Dengan demikian dapat menghindari pelanggaran hak cipta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, peneliti memberikan saran atau masukan sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola perpustakaan harus lebih tegas dalam menerapkan undang-undang hak cipta sehingga pemustaka tidak akan berani melanggar apa yang sudah menjadi peraturan perpustakaan, karena sikap pengelola perpustakaan yang kurang tegas, sehingga pemustaka tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.
2. Pengelola perpustakaan harus melakukan pengawasan terhadap pemustaka yaitu ketika suatu undang-undang telah diterapkan maka harus diiringi

dengan tindakan. Kemungkinan suatu pelanggaran akan terjadi apabila pihak pengelola dan pemustaka tidak bekerjasama dengan baik, jika pengelola lalai dalam mengawasi pemustaka maka pelanggaran itu akan terjadi. Pengelola maupun pemustaka keduanya dapat berkontribusi dalam mengatasi pelanggaran hak cipta

3. Mengadakan sosialisasi penerapan undang-undang hak cipta kepada pemustaka, karena masih banyak pemustaka yang belum mengetahui tentang undang-undang hak cipta. Misalnya:
 - 1) Melakukan seminar tentang undang-undang hak cipta di perpustakaan.
 - 2) Membuat pengumuman/informasi mengenai sanksi dari pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Amirul, Hadi. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Dampoli, Muljono. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Pres 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta*. Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Ezmir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers 2010

Kamus Istilah Manajemen. (Universitas Michigan): Pustaka Persindo, 1994.

Kansil C.S.T *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Pradya paramita, 2006.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad Ramli. *Kearifan Lokal Dalam Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar: Alauddin Press, 2011.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.3-cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Riswandi budi Agus. *Hak Cipta Di internet*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Rosidah, Anik. *Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta* (Skripsi). Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual ed.revisi-cet.3t*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Sarwono. NS. *Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Sagung Seto, 2006.

Sinar. Grafika. *Undang-Undang HAKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Soelistyo Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet.4, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R dan D)*, Bandung: Alfabeta 2010.
- Sulistyo-Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Sutarno. *Perpustakaan dan Masyarakat*, Jakarta: Sagung Seto, 2006.
- Tomatsu, Hozumi. *Buku Panduan Hak Cipta Asia (Asia CopyRight Handbook)*, Jakarta: ACCU dan IKAPI, 2006.
- Sinar Grafika. *Undang-Undang Haki , Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: 2003.



L

A

M

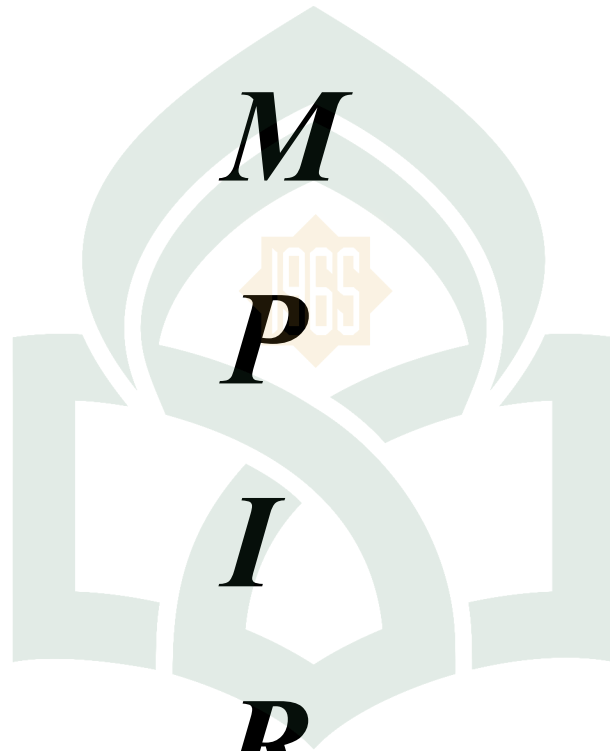
P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PANDUAN WAWANCARA

A. Implementasi UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1. Se jauh mana pengetahuan anda tentang Undang-undang Hak Cipta ?
2. Bagaimana penerapan UU 19 Tahun 2002 di Perpustakaan ini ?
3. Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta ?
4. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan perpustakaan kampus II UIN Alauddin Makassar terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayangkan sumber informasi tercetaknya?
5. Bagaimanakah kebijakan perpustakaan kampus II UIN Alauddin Makassar terkait dengan membuat salinan (*fotocopy*) yang merupakan pelanggaran Hak Cipta?
6. Apakah ada sosialisasi atau pengumuman di perpustakaan tentang undang-undang ini?
7. Bagaimana pengawasan karya ilmiah di perpustakaan?
8. Apa harapan anda adanya Hak Cipta?

B. Hambatan - Hambatan Implementasi

9. Selama anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?
10. Apa saja kendala dalam menerapkan undang-undang hak cipta?
11. Hal apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta?
12. Tindakan apa yang dilakukan terhadap pemustaka yang melakukan pelanggaran hak cipta?

13. Hal apa yang perlu dilakukan pengelola perpustakaan dalam menanggulangi tindakan pelanggaran hak cipta?
14. Bagaimana alur kerja dalam pemberian sanksi untuk implementasi?





Muhdar Alkahfi, lahir pada 22 Februari 1994 di Bantaeng, Provinsi Sulawesi – Selatan. anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Drs. Abd. Muthalib dan Hawatia Hatmah Dg. Suginnah. Penulis memulai pendidikan di Tk DDI Mattoanging Bantaeng, berlanjut SD Inpres Lasepang -Bantaeng sampai kelas empat, dan pindah ke SD inpres Tanetea Kec.Pakjukukang,Bantaeng dikarenakan jarak tempuh dari tempat sekolah sebelumnya yang lumayan jauh dari tempat tinggal. Setamat SD Berlanjut ke Mts. di Ponpes madrasatul Qur'an Hasyim Asy'ari –Bantaeng hingga tamat, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 TompoBulu,Bantaeng Hanya sampai kelas satu, dan berpindah sekolah, ke MA. Ma'arif Lasepang –Bantaeng,Terakreditasi. Jenjang akademiknya dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Berkat Rahmat Allah Swt dan doa kedua orangtua juga usaha keras penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada periode September 2017 M, Muharram 1439 H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R